

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
ABSTRACT.....	iv
INTISARI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. KEASLIAN PENELITIAN	8
E. MANFAAT PENELITIAN.....	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis Pelindungan Data Pribadi.....	15
1. Teori Privacy Rights dan Data Protection	15
2. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	18
3. Pelanggaran Data Pribadi	24
4. Konsep <i>Privacy By Design</i>	26
B. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Pelayanan Perizinan oleh DPMPSTSP DKI Jakarta	30
1. Definisi dan Klasifikasi Penyelenggara Sistem Elektronik.....	30
2. Kewajiban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik	33
3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik di Provinsi DKI Jakarta	38
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Data	48
C. Cara/Teknik Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data	51
E. Penarikan Kesimpulan	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengaturan Prinsip <i>Privacy by Design</i> dalam Kerangka Hukum Indonesia serta Perbandingannya dengan Praktik Global	53
1. Konstruksi Yuridis <i>Privacy by Design</i> dalam General Data Protection Regulation (GDPR) dan Perbandingannya dengan Pengaturan UU PDP	58



2. Arsitektur Normatif APEC Privacy Framework dalam Perlindungan Data Pribadi khususnya Pengaturan <i>Privacy by Design</i>	65
B. Implementasi Prinsip <i>Privacy By Design</i> serta Tantangannya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik yang Menjadi Kewenangan Daerah Khususnya di DPMPTSP DKI Jakarta.	70
1. Kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta dan Perannya Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik	71
2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik yang Menjadi Kewenangan Daerah di DPMPTSP DKI Jakarta dan Kaitannya dengan Pengumpulan Data Pribadi	81
3. Analisis Implementasi <i>Privacy by Design</i> dalam Lingkup Aspek Teknis, Aspek Kelembagaan, dan Aspek Regulasi, serta Kesesuaian dengan Tujuan Prinsip <i>Privacy By Design</i>	102
3. Hambatan Implementasi Serta Tantangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik Yang Menjadi Kewenangan Daerah	114
4. Model Adopsi Kebijakan dan Praktik Baik Tata Kelola Data Pribadi pada Penyelenggaraan Sistem Perizinan di Tingkat Daerah	123
BAB V.....	132
PENUTUP.....	132
A. KESIMPULAN	132
B. SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA	136